

Kekerasan Diskursif dalam Rekonstruksi Tubuh Samurai pada Era Meiji

Khairil Anwar¹, Ayu Azhariyah²

^{1,2} Universitas Hasanuddin
khairilanwar@unhas.ac.id

Received: 02/14/2026

Revised: 03/29/2026

Accepted: 03/31/2026

ABSTRACT

This study examines the discursive architecture of modern Japanese subjectivity as reflected in the writings of Tokutomi Sohō in the influential magazine *Kokumin no Tomo* (1887–1898). Employing Norman Fairclough's model through three dimensions of analysis—text, discursive practice, and social practice—this study examines how Tokutomi Sohō's *heiminshugi* discourse in *Kokumin no Tomo* functions as a discursive strategy for the construction of modern Japanese masculinity. The findings reveal three key points: (1) the symbolic delegitimization of the samurai class (*shizoku*) as *gokubushi* as a mechanism for reconstructing a new masculinity based on economic productivity; (2) a biopolitical shift from the glorification of ritual death (*seppuku*) toward economic vitality as the marker of ideal masculinity; and (3) the transformation of this productive masculinity into an imperialist force in the aftermath of the Sino-Japanese War (1895). This study concludes that the discourse of *heiminshugi* is not merely a political ideology, but a technology of power that disciplines the bodies of Japanese men—freeing them from feudal shackles only to bind them to the imperatives of the nation-state and the agenda of imperialism.

Keywords: Tokutomi Sohō; Critical Discourse Analysis; Biopolitics; Meiji Japan; Imperialism

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/nawa>

PENDAHULUAN

Restorasi Meiji atau *Meiji Ishin* (明治維新) pada tahun 1868 di Jepang kerap dipahami dalam historiografi arus utama seperti yang dikemukakan W.G. Beasley (1972) dan Marius Jansen (2000) sebagai titik balik modernisasi institusional Jepang. Masa ini sering dilihat sebagai transisi linear dari feodalisme Tokugawa (徳川) menuju negara modern. Namun, di balik narasi besar perubahan politik dan industri, terdapat wacana yang tidak banyak dibahas, yaitu krisis subjektivitas. Runtuhnya struktur kasta feodal *shi-nō-ke-shō* (士農工商) meninggalkan ruang kosong dalam definisi kejepangan. Pertanyaan krusial yang muncul di akhir abad ke-19 bukan hanya “sistem pemerintahan apa yang harus dipakai?”, melainkan sebuah kecemasan ontologis tentang “siapa subjek Jepang yang ideal untuk menghuni negara modern ini?”

Di tengah pertarungan diskursif inilah sosok Tokutomi Sohō (徳富蘇峰) (1863-1957) muncul sebagai agen kebudayaan yang dirujuk. Penelitian terdahulu cenderung menempatkan Sohō ke dalam dua wacana besar. Pertama, ia dipandang sebagai tokoh pers (Ariizumi, 1980; Pierson, 1980) dan kedua menyoroti pergeseran ideologinya dari liberalis menjadi imperialis (Pyle, 1969). Kedua pandangan ini menjadi arus utama penelitian yang berkaitan dengan Tokutomi Sohō dan cenderung tidak melihat pemikiran Sohō sebagai sebuah strategi gender. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang belum banyak dikaji, yaitu studi yang secara spesifik membaca pemikiran Sohō sebagai strategi diskursif pembentukan maskulinitas modern melalui media cetak dalam kerangka Analisis Wacana Kritis Fairclough.

Di era Meiji, Sohō menjadi acuan bagi pemuda terutama kalangan penulis di dalam membayangkan seperti apa bangsa Jepang di masa mendatang. Melalui majalah *Kokumin no*

Tomo (国民之友) yang didirikannya pada tahun 1887. Secara harfiah, majalah ini bisa diterjemahkan sebagai Sahabat Rakyat. Sohō tidak sekadar menyebarkan berita, tetapi sedang melakukan apa yang disebut Stuart Hall sebagai politik representasi (Hall, 1997). Saat itu, Sohō mengusung sebuah ideologi yang disebut *heiminshugi* (平民主義) yang dapat diartikan kerakyatan atau dalam konteks sekarang disebut populisme. Pemikiran ini hadir sebagai antitesis terhadap aristokratisme yang diusung klan Chōshū (長州) dan Satsuma (薩摩). Jika dibaca dalam pendekatan *cultural studies* terutama kajian gender, *heiminshugi* bukan semata ideologi politik, tetapi sebuah proyek konstruksi maskulinitas baru (Connell, 2005).

Jason Karlin (2014) dalam *Gender and Nation in Meiji Japan* menegaskan bahwa modernitas Jepang sangat bergender. Pada saat itu, ketakutan terbesar elite Meiji adalah pandangan dikotomistik yang menganggap Jepang sebagai sesuatu yang feminin yang acapkali diasosiasikan dengan kata sifat lemah dibandingkan Barat sebagai maskulin. Oleh karena itu, membangun citra lelaki Jepang yang kuat adalah bagian dari strategi pertahanan nasional. Di ranah inilah, Tokutomi Sohō melakukan intervensi secara radikal. Berdasarkan data tekstual dari pemikirannya, Sohō secara agresif melakukan peliyangan (*Othering*) terhadap samurai atau *shizoku* (士族). Argumennya jelas, meskipun secara historis samurai adalah simbol maskulinitas, namun di era modern, samurai adalah representasi dari maskulinitas yang usang, parasitik, dan emosional.

Sohō menawarkan model hegemoni maskulinitas baru yang disebutnya sebagai *Meiji seinen* (明治青年) yang berarti Pemuda Meiji. Berbeda dengan samurai yang menggantungkan kehormatan pada pedang dan garis keturunan, konsep *Meiji seinen* menentukan kehormatannya pada produktivitas ekonomi, kemandirian, dan rasionalitas Barat. Konsep ini berangkat dari pemikiran Sohō yang sangat terpengaruh oleh Herbert Spencer (1864) dan nilai-nilai liberal Barat. Di dalam ranah *cultural studies*, adopsi nilai Barat ini merupakan upaya Sohō untuk mendisiplinkan “tubuh” rakyat Jepang agar sesuai dengan standar peradaban global. Sohō memiliki atensi untuk mengubah habitus lelaki Jepang dari “pejuang yang siap mati” menjadi “pekerja yang siap hidup”.

Pergeseran paradigma maskulinitas ini paling tampak pada pandangan Sohō mengenai *seppuku* (切腹). Di dalam tradisi *Bushido* (武士道), *seppuku* adalah tanda keberanian dan kesucian moral yang merupakan puncak dari estetika maskulinitas. Namun, Sohō menolak keras praktik ini. Sohō memandang *seppuku* sebagai tindakan yang kontra-produktif dan mendegradasikan semangat patriotisme yang sedang digaungkan pada era tersebut. Bagi Sohō, maskulinitas sejati adalah “berani hidup untuk memperbaiki kesalahan”, bukan mati untuk menebus malu. Pergeseran pemikiran ini sangat fundamental karena berubah dari *necropolitics* (politik kematian) feodal menuju *biopolitics* (politik kehidupan) kapitalis, di mana tubuh lelaki dihargai bukan dari kematiannya, tapi dari daya gunanya bagi negara.

Pertarungan wacana dalam membentuk “subjek baru” dituliskan dan diterbitkan oleh Sohō di majalah *Kokumin no Tomo*, sebuah media yang dibuat olehnya. Di dalam tulisannya terutama di rubrik editorial dan esai, Sohō dengan tegas mengartikulasikan konsep *heiminshugi*. Wacana yang dinarasikan di dalam medianya tersebut dengan gamblang menunjukkan cara pandang Sohō yang mendukung modernitas Barat sebagai sebuah standar yang harus diikuti oleh bangsa Jepang yang saat itu tengah berupaya menentukan identitas dirinya. Hal ini menunjukkan, *Kokumin no Tomo* bukan hanya sekadar media yang mengarsipkan bukti sejarah dari pemikiran penulisnya tetapi juga menjadi arena di mana identitas *Meiji seinen* dikonstruksi, didisiplinkan dan disebarluaskan.

Namun, konstruksi maskulinitas ini juga menyimpan paradoks. Upaya Sohō menyejajarkan lelaki Jepang dengan Barat pada akhirnya menjebak Jepang dalam logika kolonialisme yang

sama. Adopsi hierarki rasial Barat mendorong intelektual Meiji untuk memandang ekspansi imperialis sebagai bukti kematangan bangsa (Zohar, 2020). Narasi Sohō, yang awalnya membebaskan rakyat biasa (*heimin*), lambat laun berubah menjadi justifikasi bagi ekspansi ke Asia Pasifik demi slogan kesejahteraan bersama. Slogan ini merupakan sebuah eufemisme untuk hegemoni imperium yang membuktikan bahwa maskulinitas modern Jepang dibangun di atas ambisi penaklukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemikiran Sohō dengan melihat konsep *heiminsbugi* bukan sekadar ideologi politik, namun juga strategi budaya untuk mendefinisikan ulang maskulinitas pemuda Jepang. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana wacana *heiminsbugi* beroperasi sebagai mekanisme kuasa di mana Sohō melalui *Kokumin no Tomo* menjadi institusinya, sekaligus membongkar bagaimana hasrat menjadi modern justru menjebak Jepang dalam hasrat imperialisme. Secara eksplisit, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana wacana *heiminsbugi* Tokutomi Sohō beroperasi sebagai mekanisme kuasa dalam merekonstruksi maskulinitas modern Jepang melalui *Kokumin no Tomo* (1887–1898). Lalu, bagaimana konstruksi maskulinitas tersebut pada akhirnya bermutasi menjadi legitimasi bagi imperialisme Jepang?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini ialah paradigma kritis. Paradigma ini memandang bahasa bukan sebagai alat komunikasi netral, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang membentuk realitas sosial. Berdasarkan paradigma tersebut, metode analisis yang diterapkan adalah Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Pemilihan model Fairclough didasarkan pada kerangka kerjanya yang dialektis dalam membedah hubungan antara teks, praktik diskursif, dan praktik sosial budaya yang lebih luas (Fairclough, 1995). Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya berhenti pada deskripsi linguistik semata, tetapi juga membongkar ideologi tersembunyi, relasi kuasa, dan hegemoni yang beroperasi di balik narasi modernisasi Tokutomi Sohō.

Secara operasional, analisis data dilakukan melalui tiga dimensi kerangka kerja Fairclough. Pertama, analisis teks (mikro), yang berfokus pada struktur linguistik seperti pilihan kata, metafora, dan tata bahasa dalam tulisan Sohō. Pada tahap ini, peneliti menelaah bagaimana penggunaan istilah biner seperti rakyat biasa (*heimin*) versus samurai (*shizoku*) digunakan untuk menciptakan eksklusi sosial. Kedua, analisis praktik diskursif (meso), yang meninjau aspek produksi dan konsumsi teks. Fokusnya adalah pada bagaimana majalah *Kokumin no Tomo* diproduksi sebagai media massa modern pertama di Jepang dan bagaimana ia dikonsumsi oleh komunitas pembaca muda yang sedang mencari identitas. Ketiga, analisis praktik sosial (makro), yang menghubungkan temuan tekstual dengan konteks situasi sejarah Meiji, khususnya transisi dari feodalisme menuju kapitalisme industri dan imperialisme.

Objek material penelitian ini adalah pemikiran Tokutomi Sohō yang termuat dalam majalah *Kokumin no Tomo*, dengan batasan temporal pada periode krusial 1887 hingga 1898. Periode ini dipilih karena mencakup fase radikal awal Sohō yang mengusung konsep populisme hingga transformasi ideologisnya pasca imperialisme. Sumber data primer berupa fragmen teks, editorial, dan esai kunci seperti manifesto penerbitan majalah (1887), esai *Shin-Nihon no Seinen*, dan *Hikan to Rakkan*. Mengingat keterbatasan akses terhadap arsip fisik asli berbahasa Jepang kuno, data tekstual diperoleh melalui sumber sekunder otoritatif yang telah melalui proses kurasi akademik ketat. Rujukan utama meliputi karya John D. Pierson (1980)

dalam *Tokutomi Soho 1863-1957: A Journalist for Modern Japan* dan analisis Kenneth B. Pyle (1969) dalam *The New Generation in Meiji Japan*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *close reading*. Data dikumpulkan melalui teknik *purposive sampling*, di mana teks dipilih bukan secara acak, melainkan berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Dalam hal ini relevansinya dengan beberapa kata kunci, seperti *heimin*, *shizoku*, *seppuku*, dan *imperialism*. Untuk menjamin validitas data dalam studi pustaka ini, peneliti menerapkan prinsip kritik sumber dengan melakukan triangulasi data antara literatur otoritatif dengan menginterpretasi Pierson (1980) dan Pyle (1969). Tujuannya untuk memastikan konsistensi makna historis dari teks yang dianalisis. Dengan demikian, meskipun menggunakan literatur sekunder sebagai perantara, akurasi substansi pemikiran Sohō tetap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Meskipun analisis dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep dari kajian gender, biopolitik, dan hegemoni, semua dimensi tersebut diposisikan hanya sebagai konteks interpretatif yang tetap berpijak pada kerangka utama AWK Fairclough sebagai alat analisis primer. Dengan demikian, teori-teori pendukung tersebut berfungsi memperkaya pembacaan, bukan menggantikan kerangka metodologis yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan AWK Fairclough sebagai kerangka analisis utama dengan tiga dimensinya, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Namun, mengingat keterbatasan akses terhadap teks primer berbahasa Jepang secara langsung, dimensi teks (mikro) dalam penelitian ini bekerja melalui terjemahan dan kutipan yang termuat dalam sumber-sumber sekunder otoritatif, yaitu Pierson (1980) dan Pyle (1969). Dengan cara ini, proses analisisnya tidak melakukan *close reading* linguistik penuh atas teks asli Jepang, melainkan membaca representasi tekstual Sohō pada sumber sekunder. Teori-teori pendukung seperti maskulinitas (Connell, 2005), biopolitik (Foucault, 1978; 1995), dan hegemoni (Gramsci, 1971) dihadirkan bukan sebagai kerangka analisis yang berdiri sendiri, tetapi berfungsi sebagai perspektif kontekstual untuk memperkaya pembacaan teks dan praktik diskursif Sohō. Ketiganya berfungsi menjelaskan mengapa wacana maskulinitas yang dibangun Sohō tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa kelas, tubuh, dan negara di era Meiji.

1. Meruntuhkan Legitimasi Kelas Samurai (*Shizoku*)

Sohō menerapkan strategi eksklusi diskursif untuk membangun wacana maskulinitas baru. Kelas sosial samurai atau *shizoku* tiba-tiba kehilangan fungsinya pasca Restorasi Meiji di tahun 1868. Pencabutan hak-hak istimewa feodal, termasuk tunjangan beras dan hak membawa pedang, menempatkan mereka dalam ketidakpastian sosial-ekonomi yang akut. Kebijakan Deflasi Matsukata (1881–1885) memperparah situasi ini. Banyak usaha kecil yang dirintis mantan samurai (*shizoku no shōbō*) menjadi bangkrut. Mereka jatuh miskin, namun tetap mengenakan jubah kehormatan yang sudah compang-camping (Pyle, 1969: 51–53). Kekosongan sosial inilah yang menjadi ruang bagi Sohō untuk melakukan intervensi diskursif.

Pada level praktik diskursif (dimensi kedua Fairclough) yang menyangkut bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi, *Kokumin no Tomo* adalah media yang kehadirannya terencana dengan baik. Ia tidak hadir hanya sekadar majalah saja. Jika menggunakan istilah Fairclough (1995, hlm. 58–60), majalah ini merupakan genre baru yang secara sadar memutus konvensi tekstual lama. Sohō meninggalkan gaya bahasa birokratis-elitis *kanbun* yang mengunci wacana publik di tangan aristokrasi, dan menggantinya dengan bahasa hibrida yang emosional, langsung, dan kadang-kadang provokatif. Keputusan tekstual ini sendiri sudah merupakan

sebuah pernyataan politik bahwa bahasa dan siapa yang berhak berbicara lewatnya adalah medan pertarungan kekuasaan yang nyata (Fairclough, 1995, hlm. 91–94).

Manifesto penerbitan *Kokumin no Tomo* tahun 1887 adalah dokumen yang paling gamblang menunjukkan cara kerja wacana ini. Dalam teks yang dikutip Pierson (1980: 94), Sohō menulis: “Wareware wa beimin nari... wareware wa karera (*keizoku/ rojin*) no dōshi ni arazu.” Artinya: kami adalah rakyat biasa... kami bukan kawan mereka, para bangsawan dan orang-orang tua itu. Dari perspektif teks (dimensi pertama Fairclough), kalimat ini dibedah sebagai berikut. Pertama, pronomina *wareware* (kami) yang repetitif bekerja sebagai apa yang Fairclough (1995: 138) sebut *synthetic personalization*. Ia menciptakan ilusi keintiman dan solidaritas dengan pembaca yang sebenarnya heterogen, tidak homogen. Pembacanya berasal dari berbagai kalangan seperti pedagang, mahasiswa, petani kaya, dan jurnalis. Kedua, partikel negasi *arazu* bukan sekadar penolakan, melainkan sebuah tindakan pembatas ontologis. Sohō sedang menggambar garis pemisah yang tegas di peta sosial Jepang. Di sini ada *kami* yang mewakili masa depan dan vitalitas, sedangkan di sana ada *mereka* yang mewakili masa lalu dan kebekuan. Mekanisme ini persis seperti yang disebut Hall (1997: 234-238) sebagai *Othering*: proses mengkonstruksi identitas diri melalui penegasan perbedaan dengan liyan.

Wacana diskursif Sohō tidak berhenti di level identitas. Ia bergerak lebih jauh, masuk ke wilayah yang jauh lebih dalam yaitu meredefinisi “tubuh ekonomi”. Mengacu pada Pyle (1969: 103-107), Sohō melabeli samurai yang menganggur dengan istilah *yūmin* (pengangguran) dan *gokubushi* (beban sosial-ekonomi). Pilihan leksikal ini sarat muatan ideologis. Istilah *gokubushi* secara harfiah berarti “mulut yang memakan” yaitu sebuah metafora yang mereduksi eksistensi manusia menjadi semata-mata fungsi biologis yang konsumtif tanpa kontribusi produktif. Di dalam konteks budaya agraria Jepang yang menempatkan beras sebagai komoditas sakral, tuduhan bahwa seseorang hanya “memakan beras negara” tanpa membalasnya dengan kerja adalah penghinaan yang melampaui dimensi ekonomi. Ia menyentuh dimensi moral dan kosmologis dalam pranata sosial Masyarakat Jepang.

Di sinilah kita bisa melihat bagaimana dimensi teks dan dimensi praktik sosial Fairclough (1995: 62-65) saling berkelindan. Pilihan kata *gokubushi* bukan lahir dari ruang kosong. Kata itu muncul dan memperkuat konteks sosial yang lebih luas yakni legitimasi ideologis negara Meiji untuk mencabut tunjangan kelas samurai. Jika meminjam istilah Gramsci (1971: 9-10), Sohō disebutkan sebagai intelektual organik kelas borjuis baru. Ia menyediakan bahasa yang dibutuhkan negara untuk membenarkan perubahan struktural tersebut. Kemiskinan samurai tidak lagi dibingkai sebagai konsekuensi kebijakan negara, melainkan sebagai kegagalan moral individu yang enggan beradaptasi. Dalam konsep Bourdieu (1991, 164-170) tentang modal simbolik Sohō sedang melakukan manipulasi dengan menarik legitimasi dari kelas samurai dan mengalihkannya ke kelas menengah baru yang ia definisikan. Bukan kelas tani miskin atau buruh, melainkan borjuis Jepang terdiri dari petani kaya (*gōnō*), pedagang, pengusaha, dan jurnalis.

Menariknya, ada hal yang seringkali luput dari pembacaan khalayak. Kenyataan bahwa Sohō tidak benar-benar menghapus konsep elitisme. Ia hanya menggeser kriteria keanggotaan dalam kelompok elit. Hasilnya adalah oposisi biner baru dalam tulisan-tulisan editorial *Kokumin no Tomo*. Bekerja adalah bentuk patriotisme sedangkan menganggur merupakan pengkhianatan moral. Narasi ini efektif karena menyentuh ketakutan dan kemarahan publik yang nyata terhadap kelas samurai yang terlihat menikmati gaya hidup santai di tengah kesulitan ekonomi. Sohō berhasil mengkonversi sentimen sosial itu menjadi wacana yang terlegitimasi.

2. Biopolitik Maskulinitas

Setelah mendelegitimasi *shizoku* sebagai kelas, Sohō lalu mengarah ke hal yang lebih personal. Ia mendefinisikan ulang makna keberanian dan kematian itu sendiri. Ini bukan sekadar pertarungan ideologi politik saja, namun juga bisa dibaca sebagai arena pertarungan wacana menjadi laki-laki Jepang.

Secara kultural konteksnya dapat dipahami dengan melihat dekade 1880-1890 yang ditandai oleh fenomena *seinen no hanmon* atau kecemasan eksistensial pemuda. Fenomena ini muncul dari disintegrasi tata nilai konfusianisme lama sementara nilai-nilai Barat belum sepenuhnya terinternalisasi (Pyle, 1969: 145-149). Kekosongan ini banyak diisi oleh romantisme *bushidō* yang menempatkan *seppuku* sebagai puncak estetika maskulinitas dan pembuktian moral tertinggi. Bagi Sohō yang dipengaruhi pragmatisme Spencer (1864: 444), glorifikasi kematian ini adalah hal yang sia-sia. Ia menuliskannya dengan bahasa yang provokatif sebagai sebuah bentuk pemborosan yang absurd.

Dalam esai-esai editorial *Kokumin no Tomo*, terutama “*Shin-Nihon no Seinen*” dan “*Hikan to Rakkan*”, Sohō melakukan apa yang dalam kerangka Fairclough (1995: 76) disebut *rewording*. Ia mengganti kosakata yang bernuansa statis dan berorientasi kematian dengan kosakata yang bervibrasi vitalitas dan gerak maju. Misalnya kata *genki* (semangat hidup), *katsudō* (aktivitas), *zenshin* (kemajuan). Dari perspektif teks, pergantian kosakata ini bukan persoalan gaya bahasa semata. Aktivitas ini merupakan tindakan ideologis dengan menghapus kata-kata yang berasosiasi dengan kematian dari perbendaharaan normatif maskulinitas. Dapat dikatakan Sohō secara aktif mendisiplinkan cara pembacanya membayangkan seperti apa maskulinitas itu.

Pierson (1980: 134) mencatat bahwa dalam salah satu esainya, Sohō menulis: “*wareware no shōrai wa zenshin ni ari*” yang artinya masa depan kita ada pada pergerakan maju. Dalam struktur gramatikal kalimat ini, subjek *wareware* kembali hadir, dan predikatnya bukan lagi tentang kehormatan melalui pengorbanan melainkan tentang pergerakan. Sohō juga secara eksplisit menyebut *seppuku* sebagai kepahlawanan palsu. Ini adalah pilihan leksikal yang sangat agresif karena ia mengambil konsep keberanian yang sakral dalam tradisi samurai dan mendekonstruksinya menjadi kepengecutan yang bersembunyi di balik estetika. Sohō berusaha membalik logika feodal dari yang berani, yaitu yang mati dengan indah, menjadi yang mampu menanggung beban kehidupan dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Pada dimensi praktik sosial, dalam kerangka Fairclough (1995: 85), dapat dilihat bagaimana wacana terhubung dengan relasi kekuasaan struktural. Gerakan diskursif Sohō ini selaras dengan kepentingan pemerintahan Meiji yang sedang berpacu membangun infrastruktur industri dan militer. Foucault (1978: 138) dalam *The History of Sexuality* menjelaskan bahwa modernitas ditandai oleh pergeseran dari model kekuasaan kedaulatan yang “berhak mematikan” menuju model biopolitik yang bertujuan “membuat hidup dan membiarkan mati.” Hal tersebut dilakukan oleh Sohō melalui majalahnya. Tubuh laki-laki Jepang diselamatkan dari *seppuku* bukan atas nama humanisme melainkan karena tubuh yang hidup lebih berguna bagi negara sebagai pembayar pajak, tenaga kerja pabrik, dan pada akhirnya sebagai prajurit (Foucault, 1995: 135).

Ironi yang Sohō sendiri mungkin tidak antisipasi adalah bahwa *Kokumin no Tomo* bukan hanya membebaskan tubuh dari kematian feodal, melainkan juga mendisiplinkan tubuh itu untuk patuh pada ritme baru seperti jam kerja pabrik, wajib militer, dan konsep keberanian versi kapitalis. Pyle (1969: 172) menuliskan hasil analisisnya tentang Sohō bahwasanya ia telah menggeser fokus pembaca dari obsesi pada *ie* (sistem keluarga feodal) menuju obsesi pada *jinkaku* (karakter individu yang mandiri). Majalahnya difungsikan sebagai medium yang

membimbing individu untuk menginternalisasi norma tertentu sebagai kepemilikannya sehingga ia dengan sukarela mendisiplinkan dirinya. Foucault menyebut ini sebagai *technology of the self* (1995:170). Tubuh pemuda Jepang dibebaskan dari kepatuhan pada kode etik feodal yang mematkan, hanya untuk segera dirantai pada logika produktivitas kapitalis yang tidak kalah menuntutnya.

3. Dari Maskulinitas Produktif menuju Imperialisme Agresif

Jika sebelumnya Sohō membangun model maskulinitas baru yang produktif dan berorientasi pada kehidupan, maka pertanyaan kritisnya, yaitu ke mana tubuh-tubuh yang sudah didisiplinkan itu dilabuhkan? Jawabannya terletak pada sebuah peristiwa traumatik yang mengubah segalanya.

Kemenangan Jepang dalam Perang Tiongkok-Jepang (1894–1895) yang terasa seperti konfirmasi bahwa proyek modernisasi *heiminsbugi* berhasil, seketika runtuh akibat Intervensi Tiga Negara (*Sangoku Kanshō*). Rusia, Jerman, dan Prancis memaksa Jepang mengembalikan Semenanjung Liaodong yang baru saja dimenangkan dengan berlumuran darah. Bagi Sohō, ini bukan kekalahan diplomatik biasa. Pierson (1980: 201-206) mencatat bahwa Sohō menggambarkan dirinya pasca intervensi tersebut dengan metafora *shibai* (死灰) yang berarti abu dingin. Kata ini merujuk pada frasa *shibai fukunen* (死灰復燃), yaitu abu yang menyala kembali. Metafora secara tekstual merupakan penanda penting yang menandai pergeseran yang terjadi bukan melalui argumen rasional, melainkan melalui transformasi afektif yang mendalam.

Transformasi ini terekam jelas dalam pergeseran leksikal yang terjadi pada editorial-editorial *Kokumin no Tomo* pasca 1895. Jika sebelumnya wacana Sohō dipenuhi kata-kata seperti *heimin* (rakyat biasa), *jiyū* (kebebasan), dan *zenshin* (kemajuan), akhirnya kosakata itu digantikan oleh terminologi yang sarat agresi. Misalnya, *yūshō reppai* (yang unggul menang, yang kalah hancur), *jaku-niku kyō-shoku* (yang lemah adalah daging bagi yang kuat), dan *chikara wa seigi nari* (kekuatan adalah kebenaran). Fairclough (1995: 104-108) menyebut pergeseran semacam ini sebagai *interdiscursivity*. Situasi ketika sebuah teks mulai menarik dari repertoar wacana yang berbeda. Ini adalah tanda bahwa Sohō telah mengubah secara fundamental posisi ideologisnya. Bahasa bukan lagi alat pencerahan, ia menjadi alat mobilisasi dan indoktrinasi (Pyle, 1969: 177).

Pada level praktik sosial, pergeseran wacana ini tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik Asia Timur akhir abad ke-19. Duus (1995: 55) menyebut istilah ini sebagai *mimetic imperialism*. Jepang mengadopsi logika kolonialisme Barat bukan karena ia percaya pada kebenaran rasialnya, melainkan karena ia merasa tidak punya pilihan lain untuk diakui setara dalam tatanan internasional yang memang didefinisikan oleh kepemilikan koloni. Sohō menyerap logika ini dan mentransformasikannya menjadi bahasa maskulinitas. Seorang laki-laki Jepang baru dianggap dewasa dan berdaulat hanya jika negaranya mampu memproyeksikan kekuatan ke luar batas kepulauan. *Tōyō no meishu* (pemimpin Timur) adalah gelar yang Sohō tawarkan dalam tulisannya. Gelar ini merupakan sebuah identitas maskulin kolektif yang mensyaratkan dominasi atas Korea dan Tiongkok sebagai prasyaratnya (Pierson, 1980: 211).

Di sinilah paradoks utama dari seluruh konsep Sohō menjadi terlihat seutuhnya. Ia memulai karirnya dengan menyelamatkan tubuh-tubuh pemuda dari kematian ritual feodal—dari *seppuku* yang ia anggap sia-sia. Ia seolah-olah sedang mendidik mereka, menyembuhkan mereka, membangun identitas *heimin* yang mandiri dan produktif. Tetapi pada akhirnya, tubuh-tubuh yang sama itu, yang telah disekolahkan, didisiplinkan, dan diarahkan untuk hidup lalu dikirim ke medan perang Manchuria dan Korea. Skalanya bahkan jauh lebih masif dari sekadar duel kehormatan klan. Bukan lagi mati demi kehormatan feodal, tetapi mati demi Kaisar di tanah

asing. Wacana yang bermula sebagai seruan pembebasan individual berakhir sebagai legitimasi intelektual bagi mesin perang imperialisme Jepang yang akan memuncak pada Perang Dunia II (Pierson, 1980: 290; Zohar, 2020: 3).

Ketiga dimensi (teks, praktik diskursif, dan praktik sosial) yang ditawarkan AWK Fairclough bergerak secara dialektis membaca wacana yang muncul dari editorial di majalah *Kokumin no Tomo*. Pilihan-pilihan leksikal Sohō tidak terjadi dalam ruang hampa. Mereka dibentuk an pada gilirannya membentuk konteks sosial-historis yang melingkupinya. *Kokumin no Tomo* bukan cermin dari realitas Meiji, melainkan aktor aktif yang turut mengkonstruksi realitas itu. Maskulinitas yang tampaknya hanya urusan identitas personal ternyata bergerak jauh melebihi hal tersebut. Ia menjadi arena pertarungan simbolik tentang siapa yang berhak menjadi aktor utama yang menghuni negara modern. Maskulinitas juga membicarakan tentang bagaimana tubuh harus digunakan, dan ke mana bangsa harus melangkah.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa korpus tulisan Tokutomi Sohō dalam *Kokumin no Tomo* (1887–1898) melampaui fungsi utamanya sebagai instrumen jurnalisme yang reformis dan sekuler. Produknya beroperasi sebagai sebuah teknologi kekuasaan yang secara radikal merekonfigurasi subjektivitas manusia Jepang di era Meiji. Dengan pendekatan analisis wacana kritis, dapat diungkap bahwa proyek modernisasi Sohō berakar pada sebuah arsitektur ambivalensi. Wacana yang didialektikakan menawarkan janji emansipasi individu dari belenggu feodal, namun pada saat yang sama menuntut subordinasi total tubuh warga negara terhadap imperatif negara-bangsa.

Di dalam ruang diskursif ini, konstruksi identitas rakyat biasa tidak lahir begitu saja dari ruang hampa. Mekanismenya lewat delegitimasi simbolik yang sistematis terhadap kelas samurai. Melalui strategi eksklusi diskursif, Sohō mengartikulasi ulang status samurai. Dari yang semula sebagai simbol elite moral menjadi *gokubushi* atau beban sosial yang memengaruhi kondisi perekonomian. Kekerasan simbolik ini berfungsi sebagai landasan bagi intervensi biopolitik yang lebih mendalam, di mana tubuh laki-laki mengalami sekularisasi makna. Dengan menolak ritual kematian feodal *seppuku* dan menggantikannya dengan *zenshin*. Sohō mengubah tubuh manusia Jepang dari wadah kehormatan ritual menjadi aset produktif yang harus dikalkulasi efisiensinya demi akumulasi modal nasional. Narasi kemandirian yang didengungkan pada dasarnya adalah bentuk pendisiplinan internal untuk mencetak subjek yang patuh secara politis dan produktif secara ekonomis.

Trajektori pendisiplinan ini menemukan kulminasinya pasca trauma Intervensi Tiga Negara pada tahun 1895, di mana nasionalisme sipil yang diusung bermutasi menjadi imperialisme agresif. Adopsi total terhadap logika *jaku-niku kyō-shoku* menjustifikasi konversi energi produktif rakyat yang telah dibebaskan tersebut menjadi mesin kekuatan militer. Pada akhirnya, warisan intelektual Sohō merefleksikan paradoks utama dari modernitas Jepang. Pembebasan subjek dari hierarki feodal domestik hanyalah sebuah prakondisi untuk mobilisasi massal dalam panggung imperialisme global. Tubuh rakyat kembali ditumbalkan, bukan demi tuan tanah, melainkan demi ambisi abstrak kekaisaran.

Menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa wacana *heiminshugi* Tokutomi Sohō dalam *Kokumin no Tomo* beroperasi sebagai mekanisme kuasa diskursif yang secara sistematis merekonstruksi maskulinitas modern Jepang melalui tiga tahap, yaitu delegitimasi samurai, disiplin tubuh biopolitik, dan mobilisasi imperialis. Kontribusi penelitian ini terletak pada pembacaan terintegrasi atas pemikiran Sohō sebagai strategi gender yang termediasi, sebuah perspektif yang selama ini absen dari kajian utama

tentang pers di masa Meiji. Penelitian ini juga menunjukkan relevansi kerangka AWK Fairclough dalam menganalisis konstruksi maskulinitas pada media di masa kolonial.

REFERENSI

- Anderson, B. (2006). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (Rev. ed.). Verso.
- Ariizumi, S. (1980). *Meiji seiji shi no kiso katei* [The basic process of Meiji political history]. Yoshikawa Kōbunkan.
- Beasley, W. G. (1972). *The Meiji restoration*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power* (G. Raymond & M. Adamson, Trans.). Harvard University Press.
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities* (2nd ed.). University of California Press.
- Duus, P. (1995). *The abacus and the sword: The Japanese penetration of Korea, 1895-1910*. University of California Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Foucault, M. (1978). *The history of sexuality: Volume 1: An introduction* (R. Hurley, Trans.). Pantheon Books.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.). Vintage Books.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.
- Hall, S. (Ed.). (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage Publications.
- Jansen, M. B. (2000). *The making of modern Japan*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Karlin, J. G. (2014). *Gender and nation in Meiji Japan: Modernity, loss, and the doing of history*. University of Hawai'i Press.
- Pierson, J. D. (1980). *Tokutomi Sobo, 1863-1957: A journalist for modern Japan*. Princeton University Press.
- Pyle, K. B. (1969). *The new generation in Meiji Japan: Problems of cultural identity, 1885-1895*. Stanford University Press.
- Spencer, H. (1864). *The principles of biology (Vol. 1)*. Williams and Norgate.
- Weber, M. (2001). *The Protestant ethic and the spirit of capitalism*. Routledge.
- Zohar, A. (2020). Introduction: Race and empire in Meiji Japan. *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, 18(20), 1–12. <https://apjjf.org/2020/20/zohar>